



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
OPTIMALISASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DI BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
18 – 20 MARET 2022



SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
2022

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	DASAR HUKUM	5
BAB III	PELAKSANAAN DAN TEMUAN LAPANGAN	6
BAB IV	REKOMENDASI	11
BAB V	PENUTUP DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Untuk melakukan komunikasi dan menyerap aspirasi berkaitan dengan program penyaluran bantuan sosial di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tujuan

1. Secara umum untuk mendapatkan data faktual mengenai penyaluran bantuan sosial di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. Secara khusus untuk mendapatkan data faktual mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Objek Kunjungan

Lokasi Pertemuan dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Jalan Aneka Tambang, Trikora, Palam, Campaka Kota Banjar Baru, dan Kantor Dinas sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

D. DAFTAR NAMA

TIM KUNSFİK KOMISI VIII DPR-RI
MENGENAI
OPTIMALISASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DI BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN

TANGGAL 18 – 20 MARET 2022

NOMOR		N A M A	JABA TAN	FRAKSI	DAPIL
UR UT	ANG T				
1.	3	H. MARWAN DASOPANG	Wkl. Ketua	P K B	SUMUT II
2.	211	UMAR BASHOR	Anggota	PDIP	JATIM IV
3.	225	M. HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BAN TEN I
4.	231	IGN KESUMA KELAKAN, ST., M.Si.	Anggota	PDIP	B A L I
5.	121	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	Anggota	G E R	N T B I
6.	125	Drs. H. SAIFUL RASYID, MM.	Anggota	G E R	KAL SEL I
7.	132	HAERUL SALEH, SH	Anggota	G E R	SUL TRA
8.	413	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	Anggota	PKS	SUMUT II
9.	510	H. MUHAMMAD RIZAL, SH., M.SI	Anggota	PAN	BAN TEN III
10.	-	AGUS WIDIJATMOKO, S.H.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
11.	-	HERU PRIBADI	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
12.	-	RIZZA BIMA PERMATA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
13.	-	MOHAMMAD HASYIM, S.S., M.Si.	TENAGA AHLI KOMISI VIII DPR RI		
14.	-	AHMAD ARI MASYHURI, M.Ag.	TENAGA AHLI KOMISI VIII DPR RI		
15.	-	SAFITRI RESTU WIDYOWATI	MEDIA SOSIAL DPR RI		

BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi DPR RI.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial

Secara umum, kawasan di Kalimantan selatan memiliki dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan. Bahkan, beberapa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan, penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Kondisi penyaluran bantuan sosial di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kendala, salah satunya karena alasan geografis. Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu melakukan inisiatif untuk mendekatkan layanan kepada para penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal keluarga penerima manfaat (KPM) agar bantuan segera bisa diterima. Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Dalam jangka panjang, penting adanya peraturan khusus, yang nantinya menjadi landasan hukum Bank Himbara dan PT Pos menyalurkan bansos, mengingat kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalimantan selatan memang perlu pendekatan khusus dengan cara dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis melalui administratif yang sederhana dan akuntabel.

Pada kesempatan kunjungan spesifik tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak H. Marwan Dasopang, M.Si menyatakan dari berbagai laporan yang diterima pihaknya, penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Selatan mengalami berbagai kendala. Mulai dari kondisi geografis hingga persoalan data penerima ditengarai menjadi faktor tersendatnya penyaluran bantuan tersebut. Oleh karena itu, kendalanya bukan hanya jarak saja, tapi juga karena tidak ditemukan orangnya (penerima manfaat). Uang menjadi tidak tepat sasaran sementara di pihak lain yang membutuhkan tidak menerima.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak H. Marwan Dasopang, M.si Marwan menyebut ketidaksesuaian data hingga adanya perbedaan data antara Kemensos dan *stakeholder* menyebabkan dana bansos menjadi sia-sia. Selain tidak

tersalurkan, dana tersebut pun menjadi tidak efektif. Kalau bantuan sosial kita ini katakan mendapat PKH (Program Keluarga Harapan), mendapat BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), mendapat KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan lainnya. Itu sebetulnya bisa menerima Rp10 juta per satu tahun per satu keluarga. Kalau ada Rp10 juta, dikali 1 juta data tidak valid se-Indonesia itu Rp10 triliun uang sia-sia dalam satu tahun karena ketidakjelasan datanya.

Disamping itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak Marwan Dasopang juga melihat bahwa tidak ada koordinasi yang kuat antara Kemensos dengan *stakeholder*. Ia menyebut, baik Kemensos maupun *stakeholder* melakukan tugasnya dengan tidak terkoordinasi dengan baik. Dari hal itu, ia pun menegaskan bahwa Kemensos tidak bisa persoalan bansos sendirian, ini harus melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), melibatkan Kantor Pos, melibatkan pemerintah kabupaten/kota, dan agar *stakeholder* selain menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan *update* data sehingga baik Kemensos dan *stakeholder* tidak menggunakan data masing-masing melainkan menjadi satu data yang *update* dan tervalidasi. Sumber data DTKS harus update dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan proses garduasi terukur pada setiap periode pada masing-masing daerah kabupaten/kota, berikan mereka ketrampilan dan bantuan modal yang mencukupi sehingga target graduasi menjadi proses yang dapat mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19 menuju endemi melalui berbagai program optimaisasi penyaluran bantuan sosial selama ini.



Suasana pertemuan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, pimpinan rombongan wakil ketua komisi VIII DPR RI diterima langsung oleh gubernur Kalsel Bapak H. Sahbirin Noor, mengucapkan terimakasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI yang akan menghimpun berbagai informasi tentang optimalisasi penyaluran bansos di Kalsel, semoga informasi yang diharapkan oleh komisi ini, nantinya bisa kita sampaikan secara akurat dan tepat, jelas gubernur Kalsel, pada kegiatan itu(18/3), turut hadir Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dan pihak dari Kementerian Sosial, diantaranya Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa, Sekretaris Ditjen Linjamsos, Robben Rico, serta Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK), Heri Kris Sritanto.

B. Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial

Pada saat kunjungan spesifik, rombongan komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Drs. H. Marwan Dasopang M.Si bersama anggota komisi VIII DPR RI dan Dirjen Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI, bertatap muka langsung dengan penerima manfaat (KPM) di balai latihan kerja sosial Dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial di Banjarmasin, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Kota Banjarmasin, mulai dari penyaluran bansos sampai pemanfaatan program oleh penerima manfaat. Pada kegiatan ini, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota

Banjarmasin menerima secara simbolis bantuan sosial 3 Lumbung Sosial untuk kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Banjarmasin timur yang kemudian akan di manfaatkan untuk keperluan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Banjarmasin



Penyerahan langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI Bapak M. Hasbi Asyidiki Jayabaya ke Dinas Sosial Kalimantan Selatan pada saat kunjungan spesifik (18/3) disaksikan oleh pihak dari Kementerian Sosial, diantaranya Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa, Sekretaris Ditjen Linjamsos, Robben Rico, serta Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK), Heri Kris Sritanto dan peserta KPM di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Kondisi pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat di propinsi kalimantan selatan, upaya yang dilakukan dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) oleh Kementerian sosial RI sangat membantu masyarakat yang terdampak, ini bisa menjadi pengaman sosial bagi masyarakat, sesuai laporan dari Kemensosr RI sampai dengan 16 maret 2022 realisasi penyaluran sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sudah mencapai Rp98 miliar, termasuk di dalamnya Rp15 miliar di kota banjarmasin.

Penyaluran bantuan sosial melalui dinas sosial bekerjasama dengan PT Pos dan Himbar sebagai penyalur. Saat ini jumlah penduduk pra sejahtera dan terdampak covid-19 di kalse sebanyak 532.099 keluarga dengan 74.200 keluarga berdomisili di banjarmasin dan sisanya tersebar di pelosok propinsi kalses, adapu indeks bantuan sembako sejak covid-19 mengalami kenaikan menjadi Rp200.000 per KPM perbulan yang sebelumnya bernilai Rp110.000 – Rp150.00 per KPM perbulan.



Suasan penyerahan bantuan sosial oleh anggota komisi VIII DPR RI Bapak H. Muhammad rizal SH, M.Si bersama rombongan komisi VIII DPR RI dan pihak dari Kementerian Sosial, diantaranya Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Asep Sasa, Sekretaris Ditjen Linjamsos, Robben Rico, serta Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK), Heri Kris Sritanto serta kepala Dinas Sosial Propinsi dan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan beserta penerima KPM

BAB IV

REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kab Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan mengenai **optimalisasi penyaluran bantuan sosial di Banjarmasin, Kalimantan Selatan** maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) KPM pada setiap Kabupaten/Kota agar penyaluran bansos dapat benar-benar tepat sasaran dan tepat waktu.
2. Mendekatkan prioritas pelayanan penyaluran bantuan sosial ke KPM oleh Dinas sosial melalui Penyalur bantuan sosial dari Bank Himbara dan PT Pos, agar penerima KPM tidak harus datang ke kota kabupaten yang menyebabkan biaya tinggi.
3. Mendorong Dinas Sosial dan stakeholder untuk membuat skema graduasi KPM agar kemandirian ekonomi KPM terukur dan terealisasi dengan baik
4. Memantau langsung distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS), rekening terblokir dan data ganda pada perbankan penyalur (Himbarra) dan PT Pos
5. Merumuskan dan mematangkan konsep serta manajemen Penyaluran Bantuan Sosial di daerah yang rawan bencana dan jauh dari pusat kabupaten/kota.
6. Mengoptimalkan bantuan sosial yang masih rendah di Kalimantan selatan makin meningkat cakupan penyaluran bantuan sosial
7. Mendorong peningkatan dukungan program bantuan sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten/kota dan APBD Propinsi Kalimantan Selatan

BAB. V

PENUTUP DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK

Demikian pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI mengenai optimalisasi penyaluran bantuan sosial di Banjarmasin, Kalimantan Selatan semoga menjadi bahan dan masukan terkait program tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran bantuan sosial dimasa mendatang.

Jakarta, 18 Maret 2022

TIM KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI

Ketua Tim/ Wakil Ketua

Drs. H. Marwan Dasopang, M.Si

PUBLIKASI MEDIA CETAK – ELEKTRONIK

The screenshot shows the RRI Banjarmasin website. The main article is titled "Komisi VIII DPR Cek Kelancaran Penyaluran Bansos di Kalsel". The article features a photo of a man in a white shirt presenting a certificate to a man in a batik shirt. The date is Saturday, March 26, 2022, at 00:31:19 AM. The website has a navigation bar with categories like EDITORIAL, BERITA FOTO, PODCAST, VIDEO, JURNALIS, and RRINET. There are also live streaming and radio streaming options for RRI NET.

The screenshot shows the official website of the VIII DPR Commission of the RI in Banjarmasin, Kalimantan. The main article is titled "KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE KOTA BANJARMASIN DI PROVINSI KALIMANTAN". The article features a photo of a group of people, including a man in a batik shirt, holding a certificate. The website has a navigation bar with categories like Foto Kegiatan, Berita dan kegiatan, Bank Data, and Agenda Kegiatan. The Bank Data section lists various reports and their hit counts: LKPJ, LPPD dan IKK 2020 (7209 Hits), Perjanjian Kinerja 2020 (6919 Hits), Revisi Renstra 2016-2021 (7184 Hits), LAKIP 2020 (7042 Hits), and LAKIP LAKIN Tahun 2016 (14248 Hits). The Agenda Kegiatan section is also visible.

Together with MoSA, Commission VIII of DPR RI Conducted a Specific Working Visit in South Kalimantan

Ministry of Social Affairs
Republic of Indonesia

HOME PROFILE NEWS CATEGORY PUBLIC SERVICES INFOGRAPHIC DOWNLOAD VIDEO CONTACT US

Categories

- Directorate General of Social Rehabilitation (2062)
 - Education, Research and Social Counseling Agency (184)
 - Inspectorate General (21)
 - Directorate General of Social Empowerment (161)
 - Directorate General of Social Protection and Security (284)
 - Directorate General of Poverty Handling (255)
 - Secretariat General (16)

Most Viewed

abdispersadfm.co.id/2022/03/18/pemprov-kalsel-sambut-baik-kedatangan-komisi-viii-dpr-ri/

BANJARBARU – Rombongan Komisi VIII DPR RI didampingi Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Asep Sasa Purnama, melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial di provinsi ini.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (kiri), saat bertukar cendera mata dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang

Dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, seluruh rombongan disambut hangat oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov Kalsel, Jumat (18/3).

Dalam sambutannya Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menyampaikan, seluruh informasi mengenai penyaluran

20 BNN RI
SENGGAMU MENJALU INDONESIA BERKUALITAS
22 MARET 2022 - 22 MARET 2022

LEMBAGA PENYALURAN PUBLIK LOKAL
RADIO PERSADA FM
SELAMAT HARI JADI KE-27
POLDA KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
KEMASUKAN DAN PERALIHAN
22 MARET 1995 - 22 MARET 2022

Kotak Masuk (75) x University Pamul x (8) WhatsApp x Kunsfik bansos b x Dinas Sosial Kota x Bersama Kemens x Kunsfik Commis x +

kemensos.go.id/index.php/bersama-kemensos-komisi-viii-dpr-ri-melakukan-kunjungan-kerja-spesi

021-3100470 | info@kemensos.go.id English

BERANDA PROFIL KATEGORI BERITA LAYANAN PUBLIK INFOGRAFIS UNDUH VIDEO KONTAK KAMI

Bersama Kemensos, Komisi VIII DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kalimantan Selatan

Screenshot_2022-03-19-04-47-56-55

BANJARBARU (18 Maret 2022) - Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi VIII DPR RI beserta Kementerian Sosial RI di Banjarmasin dalam rangka mengenai optimalisasi penyaluran bantuan sosial. Pada kunjungan kerja kali ini, anggota Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang didampingi Dijen Penanganan Fakir Miskin, Asap Sasa Putrama, Sekretaris Dijen Linjansos Robben Rio, Sekretaris Penanganan Fakir Miskin, Beni Sujanto dan Direktur JSK Heri Kris Sritanto meninjau kegiatan tersebut yang dilaksanakan selama satu hari dan bertempat di aula serbaguna BBPPKS Banjarmasin.

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau sejauh mana penyaluran bantuan tersebut telah dilaksanakan, dan apa sudah tepat sasaran, sebut politisi PKB ini.

Pada kunjungan ini, anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan secara simbolis bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Budi Luhur dengan total Rp. 256.630.200,- kepada 279 Anak yatim, dan 56 orang bantuan kewirausahaan yang diwakili oleh Isna Rizkyana Lestari, dan Muhammad Rusli masing - masing dalam program ATENSI kewirausahaan.

Diharapkan dengan adanya kunjungan ini ada dukungan dari Komisi VIII DPR RI untuk masyarakat yang kurang mampu agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran, ujar PLT Sentra Budi Luhur

Categories

- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (2062)
- Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (184)
- Inspektorat Jenderal (21)
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (161)
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (284)
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (255)
- Sekretariat Jenderal (16)

Paling Banyak Dilihat

Kemensos Siap Salurkan Rp9 Triliun untuk Bansos pada Januari 2020

Type here to search


Kotak x Univer x (8) Wh x kenda x Dinas x Bersa x InfoPu x Komis x Pempr x K8-12 x Parlem x +

dpr.go.id/berita/detail/id/38087/t/Komis+VIII+Temukan+Berbagai+Persoalan+Bansos+di+Kalsel

Menu Pencarian Webmail Kontak PPID TV Parlemen Layanan EN ID

Komis VIII Temukan Berbagai Persoalan Bansos di Kalsel

19-03-2022 / KOMISI VIII



SHARES

f

Twitter

Print

Light

Type here to search

29°C 26/03/2022

Kotak x Univer x (8) Whi x G Kunsfi x Dinas x Bersan x InfoPu x Wabu x Komis x Pempr x KB-12 x

abdiipersadafm.co.id/2022/03/18/pemprov-kalsel-sambut-baik-kedatangan-komisi-viii-dpr-ri/

Pemprov Kalsel Sambut Baik Kedatangan Komisi VIII DPR RI

2 min read

18 Maret 2022 Rizky Hidayat



Suasana kunker Komisi VIII DPR RI di RR H Maksid Setdaprov Kalsel

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABDI PERSADA BA, PPA

W20 RECORD PROTECTOR

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABDI PERSADA BA, PPA

Selamat dan Sukses HUT Bank Kalsel KE-58

Melaju Bersama Tanpa Batas

IBNU MIN HAJI, S.E.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL ABDI PERSADA BA, PPA

SELAMAT & SUKSES ATAS PERINGATAN HARI LAHIR BNN-RI YANG KE-20 TAHUN

Type here to search

29°C IND 00:34 26/03/2022


Parlementaria Terkini - Dewan P... x +

dpr.go.id/berita/detail/ri/38094/t/javascript

Menu Pencarian Webmail Kontak PPID TV Parlemen Layanan EN ID

Hasbi Asyidiki Harap Ada Graduasi Taraf Hidup Penerima Bansos

20-03-2022 / KOMISI VIII



SHARES

f

Twitter

Light

Type here to search

29°C IND 00:06 26/03/2022